

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK SEWA RAHIM
ATAU SUROGASI DALAM PANDANGAN SISTEM HUKUM
PIDANA DI INDONESIA**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam

Rangka Memperoleh Gelar Sarjana

Oleh :

IRAWANI SOLEMAN HARAHAP

2110111121

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H

Dr. Siska Elvandari, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2025

No.Reg : 09/PK.IV/V/2025

	No. Alumni Universitas	Irawani Soleman Harahap	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Batam/ 01 Juli 2002 b. Nama Orangtua : Harman Soleman Harahap dan Sriwahyuningsih c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Pidana e. No. BP : 2110111121	f. Tanggal Lulus : 12 Agustus 2025 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 4 Tahun i. IPK : 3,88 j. Alamat : Perum Taman Kartini Raya Tahap 1 Blok 1 No. 16, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK SEWA RAHIM ATAU SUROGASI DALAM PANDANGAN SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

(Irawani Soleman Harahap, 2110111121, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 86 Hlm, 2025)

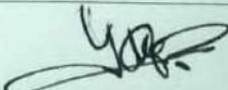
ABSTRAK

Kemajuan teknologi reproduksi berbantu (*Assisted Reproductive Technology/ART*), khususnya praktik sewa rahim (surogasi), telah menimbulkan persoalan hukum, etika, dan hak asasi manusia yang kompleks. Surogasi, yakni praktik di mana seorang perempuan mengandung anak untuk kemudian diserahkan kepada pihak lain, masih menjadi perdebatan di Indonesia karena belum adanya pengaturan hukum positif yang secara eksplisit mengatur mengenai legalitas, batasan, maupun perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik ini. Kekosongan hukum tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat berimplikasi serius terhadap perlindungan martabat perempuan sebagai ibu pengganti dan hak-hak anak yang dilahirkan dari praktik ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan sistem hukum pidana di Indonesia terhadap praktik surogasi serta membandingkannya dengan pengaturan di beberapa negara lain dari sudut pandang hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin, serta studi kasus yang mendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun praktik sewa rahim belum secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, praktik ini berpotensi melanggar sejumlah ketentuan pidana seperti pemalsuan identitas (Pasal 263 KUHP), eksploitasi perempuan (UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO), dan bahkan perdagangan anak. Selain itu, praktik surogasi yang bersifat komersial juga dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan norma moral yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Hasil perbandingan dengan negara-negara seperti India, Inggris, dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang tegas dan komprehensif sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan praktik ini. Di Indonesia, praktik surogasi masih berlangsung secara diam-diam dan informal, sehingga tidak hanya melanggar asas-asas hukum pidana, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian terhadap status hukum anak, kontrak surogasi, dan perlindungan ibu pengganti dari sisi kesehatan maupun psikologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanpa regulasi yang jelas, praktik sewa rahim dapat menjadi bentuk eksploitasi baru terhadap perempuan dan anak yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu adanya perumusan aturan pidana yang tegas dan berkeadilan untuk mengisi kekosongan hukum, melindungi pihak yang rentan, dan menciptakan sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, serta ideologi Pancasila sebagai dasar negara.

Kata Kunci : Sewa Rahim, Surogasi, Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia, Kekosongan Hukum, Eksploitasi

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 12 Agustus 2025.

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Tenofrimer, S.H., M.Si	Yandrizza, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Pidana: Riki Afrizal, S.H., M.H.


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:



Alumni University Number

Irawani Soleman Harahap

Alumni University Number

- a. Place/Date of Birth : Batam/01st July 2002
b. Parents' Name : Harman Soleman Harahap and Sriwahyuningsih
c. Faculty : Law
d. Concentration : Criminal Law
e. Student ID : 2110111121

- f. Graduation Date : 12th August 2025
g. Pass Predicate : Cumlaude
h. Length of Study : 4 years
i. GPA : 3,88
j. Address : Perum Taman Kartini Raya Tahap 1 Blok 1 No. 16, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

JURIDICAL REVIEW OF SURROGACY PRACTICES IN THE PERSPECTIVE OF THE INDONESIAN CRIMINAL LAW SYSTEM

(Irawani Soleman Harahap, 2110111121, Faculty of Law, Andalas University, 86 Pages, 2025)

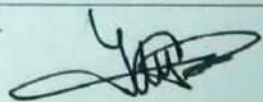
ABSTRACT

The advancement of assisted reproductive technology (ART), particularly surrogacy, has introduced new complexities in the fields of law, ethics, and human rights. Surrogacy, or gestational arrangement through which a woman carries a child on behalf of others, remains a controversial practice in Indonesia due to the absence of specific legal regulations addressing its legality, scope, and limitations. This legal vacuum raises concerns related to the protection of human dignity, particularly for women acting as surrogate mothers and children born from such arrangements. The aim of this research is to examine the juridical view of Indonesia's criminal law system on the practice of surrogacy, as well as to analyze and compare how other countries regulate similar practices from a criminal law perspective. This study employs a normative juridical approach supported by statutory and conceptual frameworks, focusing on the synchronization and interpretation of legal norms related to reproductive health, criminal law, human rights, and bioethics. Data was collected through legal literature review, including statutory regulations, doctrines, legal commentaries, and relevant case studies. The findings reveal that although surrogacy is not explicitly regulated in Indonesia's Criminal Code, it may intersect with various criminal offenses such as identity fraud (Article 263 of the Criminal Code), exploitation of women (Law No. 21 of 2007 on Human Trafficking), and potential child trafficking. Furthermore, surrogacy as a commodification of the human body contradicts several national principles, especially those rooted in Pancasila, which upholds human dignity, social justice, and moral order. Comparative analysis with countries such as India, the United Kingdom, and the United States indicates the necessity of clear and comprehensive legislation to prevent the misuse and commercialization of women's reproductive functions. In the Indonesian context, the unregulated practice of surrogacy often takes place informally, raising serious legal uncertainties for all parties involved—particularly with respect to the legal status of the child, the enforceability of surrogate contracts, and potential psychological harm to surrogate mothers. This study concludes that surrogacy, if left unregulated, may lead to significant ethical violations, exploitation, and injustice. It calls for the formulation of a clear, just, and human-centered legal framework that balances individual reproductive rights with public interest, while also ensuring protection for vulnerable parties. The regulation of surrogacy must reflect Indonesia's moral, cultural, and religious values, align with its constitutional commitment to human rights, and provide legal certainty within the criminal justice system.

Keywords: Surrogacy, Surrogate Mother, Criminal Law, Human Rights, Legal Vacuum, Exploitation

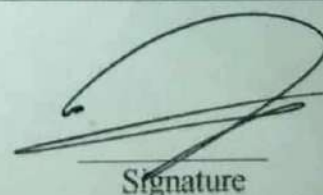
This minor thesis has defended in front of the examiner team at August 12th, 2025.

Examiner,

Signature	1. 	2. 
Name	Tenofrimer, S.H., M.Si	Yandrizza, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of State Criminal Law: Riki Afrizal, S.H., M.H.



Signature

Alumnus has been registered in the Faculty/University under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: